

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintahan kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara

The influence of economic growth, regional original income, general allocation funds and profit sharing funds on the regional financial independence of district/city governments In North Sumatra Province

Rapma Wati Siringo

18030205@student.umri.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Abstrack

This study aims to examine the effect of Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on the Level of Regional Financial Independence in Regency/City Governments in North Sumatra Province in 2017-2021 either partially or simultaneously. The type of research used in this research is quantitative research. The sample in this study were 33 Regency/City Governments in North Sumatra Province. The type of data that will be used in this research is secondary data. The analytical method used in testing the hypothesis is Panel Data Regression. Based on the results found, it can be seen that Economic Growth and general allocation funds partially have a significant negative effect on the level of regional financial independence in the province of North Sumatra. , Regional Original Income, partially has a positive and significant influence on the Level of Regional Financial Independence of Regency/City Governments in North Sumatra. Meanwhile, the profit sharing fund has no significant effect on the level of regional financial independence. In addition to these results, other results in this study also show that simultaneously all independent variables in this study have a significant influence on the level of regional financial independence.

Keywords: *Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Level of Regional Financial Independence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021 baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah Analisis Regresi Data Panel yang dilakukan dengan menggunakan bantuan software eviws 10. Berdasarkan hasil yang ditemukan, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi sumatera utara, Pendapatan Asli Daerah, secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan Dana Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain hasil tersebut, hasil lainnya dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia yang memiliki tantangan perekonomian pasar bebas merupakan konsekuensi perkembangan perekonomian globalisasi, baik secara global maupun domestik. Perkembangan-perkembangan sebelum ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah dalam mengendalikan perekonomian nasional wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, disamping mengatur dan menjaga kelancaran sistem perekonomian yang berfihak pada ekonomi kerakyatan. Sebagaimana di kemukakan dalam substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa: “pemerintah dalam implementasi pembangunan perekonomian nasional berkomitmen tegas dan konsisten akan kestabilan moneter, serta meningkatkan kinerja kerangka kebijakan moneter yang ditetapkan”.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan daerahnya termasuk dalam hal pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, merubah tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kearah yang lebih baik serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Suatu daerah dikatakan mampu berotonomi apabila tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil atau dengan kata lain, mampu membiayai penyelenggaraan didaerahnya, dengan memanfaatkan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya. Melalui otonomi daerah, kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman, selain itu kemandirian keuangan daerah PAD juga disebabkan oleh banyak faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), bagi hasil dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan jumlah penduduk.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah (Halim, 2007). Semakin tinggi angka rasio kemandirian atau daerah, maka akan semakin mandiri pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang juga akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dimata masyarakat.

Nugraha (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika rasio kemandirian tinggi itu berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) rendah dan sebaliknya. Sebagaimana di kemukakan berikut tabel pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan.

Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
00,00%-25,00%	Rendah Sekali
25,01%-50,00%	Rendah
50,01%-75,00%	Sedang
75,01%-100,00%	Tinggi

Sumber: Halim 2007

Di Indonesia, fenomena yang dihadapi ialah relatif kecilnya kontribusi PAD didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat mendominasi susunan APBD. Dimana seharusnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemerintah di daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah semakin kecil. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah

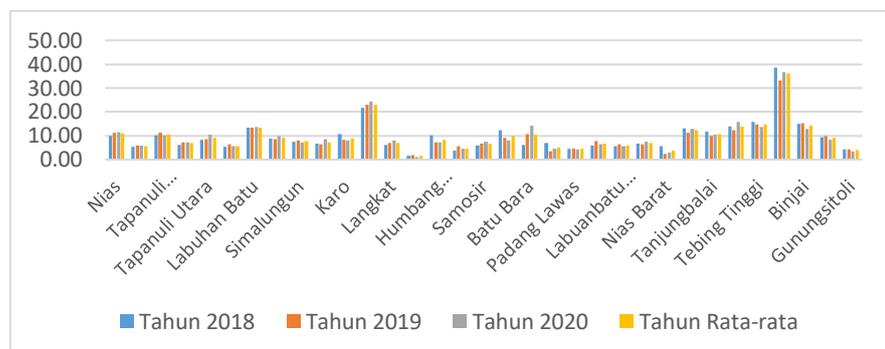
Tabel 2 Teralisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)

Tahun	PAD	APBD
2019	169.993.478.633	357.559.640.616
2020	148.710.876.245	333.019.744.319
2021	178.319.196.941	364.561.338.137

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Sebagai daerah otonom, Sumatera Utara diharapkan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Namun kenyataannya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari harapan mandiri tersebut. Pemda sudah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan/potensi daerah yang dimiliki. Peran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Untuk mengembangkan tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Pemerintah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya, mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih baik, penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut.



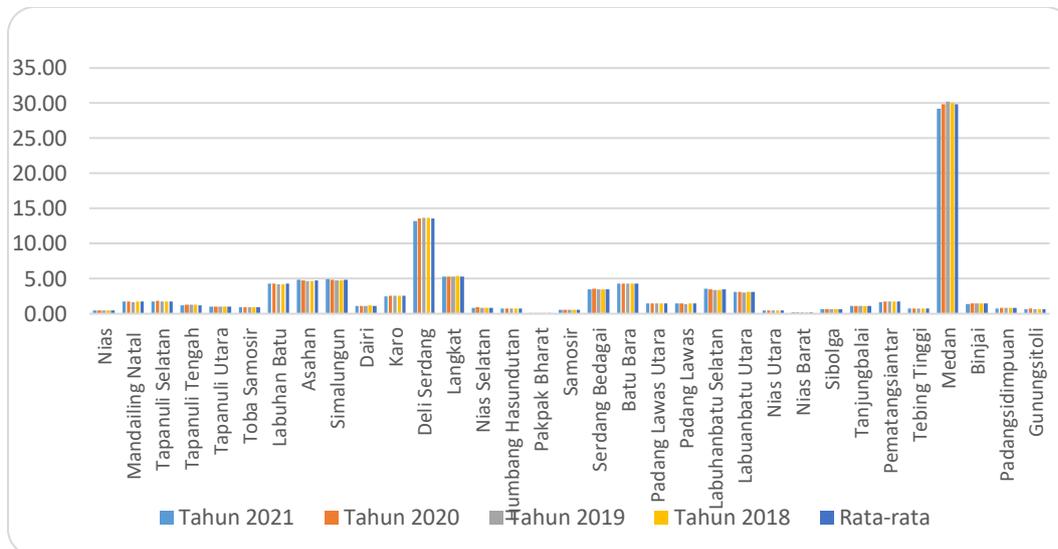
Sumber: *djbc.kemenkeu 2018-2020, diolah*

Grafik 1 Rasio Kemandirian Daerah Pemda Se-Sumut Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui tingkat kemandirian daerah di Provinsi Sumatera Utara rendah sekali. Jika di hubungkan dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah maka tingkat kemandirian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tergolong dalam kategori kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Namun jika dilihat masing-masing pemerintah daerah di Sumatera Utara, kota Medan adalah Pemda yang memiliki kemandirian tertinggi (rata-rata 36,08) dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan kemandirian dikategorikan rendah dengan pola hubungan partisipatif. Hubungan parsipatif dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, sedangkan pemerintah daerah Kabupatean/Kota menduduki tingkat kemandirian pada peringkat terakhir adalah Nias Selatan dengan nilai rata 1,59%. Hal diatas menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provisi Sumatera Utara masih sangat tergantung terhadap tranfer dari Pemerintah Pusat.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan adanya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas suatu perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Perbedaan potensi dan karesteristik tiap daerah yang menjadi permasalahan dalam membangun perekonomian daerah seperti:

1. Adanya ketimpangan pembangunan sektor industri
2. Kurang meratanya investasi
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah
4. Perbedaan sumber daya alam
5. Perbedaan demografis
6. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah

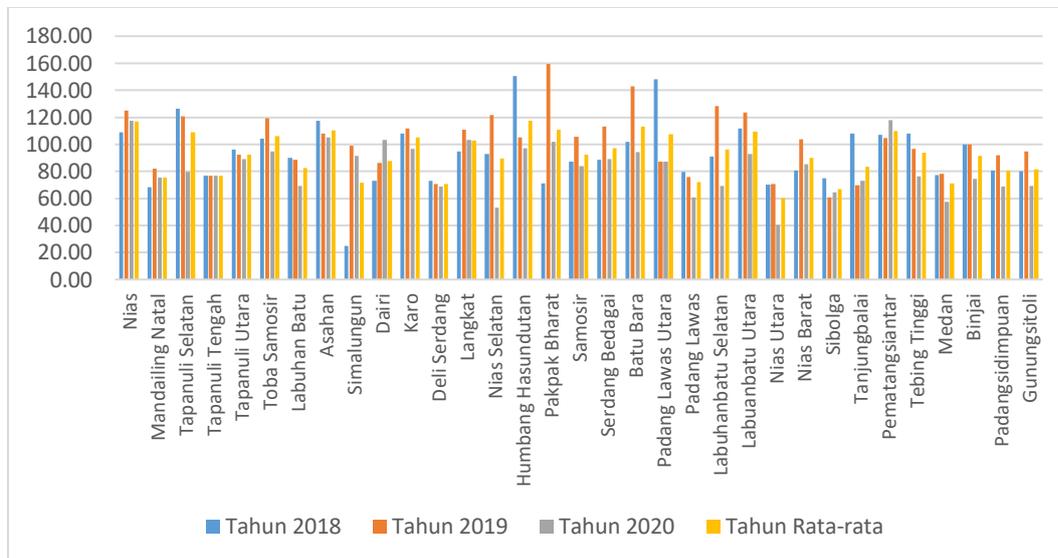


Sumber: BPS Sumut, 2018-2020

Grafik 2 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Pada grafik di atas dapat dilihat di Sumatera Utara dari nilai rasio pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada kota Medan dengan rata-rata pertumbuhan 29,83 sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada pada Pakpak Bharat dengan nilai rata-rata 0,15 dan Nias Barat 0,23.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah dapat mengalih potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dibidang keuangan. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah di harapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas dan kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

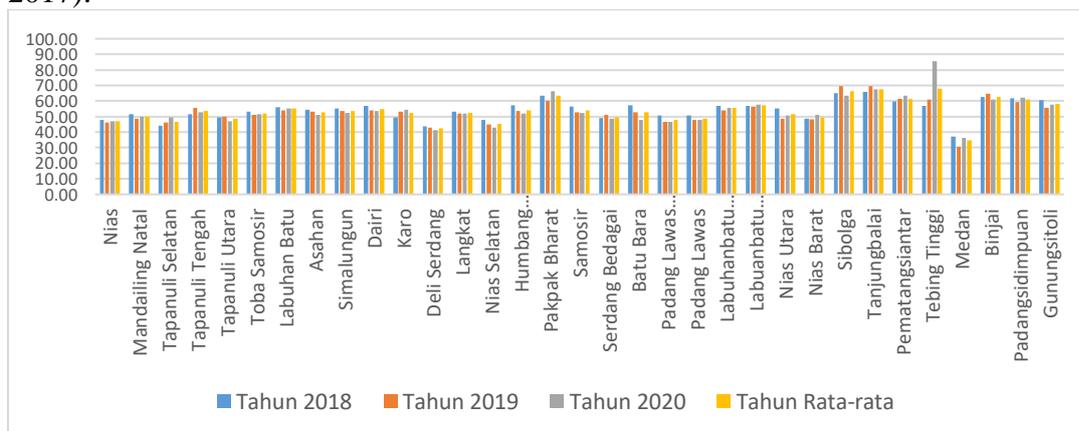


Sumber: djpk. Kemenkeu 2018-2020, diolah

Grafik 3 Rasio Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Dari grafik di atas, dapat dilihat persentase rasio Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kemampuan pemerintahan Sumatera Utara dalam memobilisasi penerimaan PAD masih tergolong kurang efektifitas, dikarenakan masih banyak Kabupaten/Kota rasio efektifitasnya di bawah 100% (<100%).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat ke daerah otonom. DAU merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU terletak pada kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan perimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Widiasih dan Gayatri, 2017).

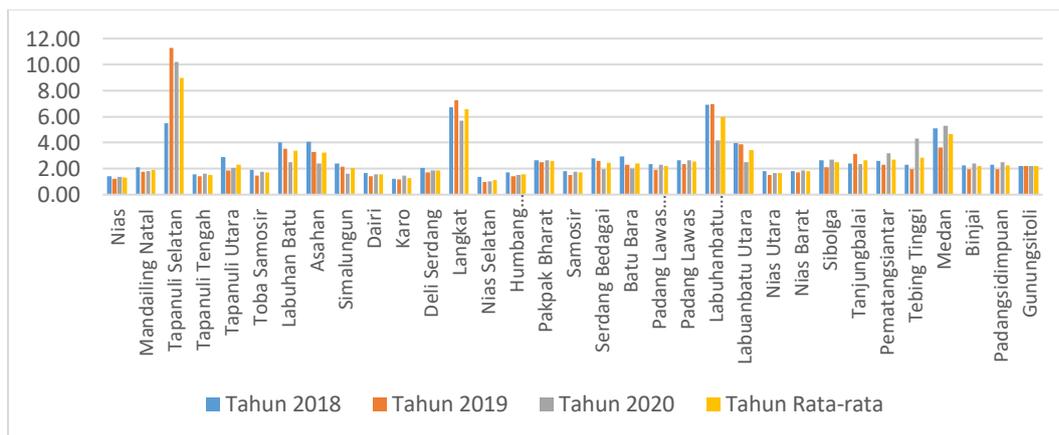


Sumber: djpk. Kemenkeu 2018-2020, diolah

Grafik 4 Rasio Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota (persen)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi Umum yang di terima dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Sumatera Utara tergolong masih tinggi dikarenakan masih banyak Kabupaten/Kota yang tingkat penerimaan DAU-nya cukup tinggi. Semakin besar penerimaan DAU yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat mengelolanya dengan baik, karena hal ini berdampak pada perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Sebaliknya jika pemerintah daerah daerah tidak bisa memaksimalkan dana tersebut maka masyarakatlah yang dirugikan. Akan tetapi, dengan semakin besarnya persentase DAU yang terima oleh pemerintah daerah artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain dana alokasi umum dan dana bagi khusus.



sumber : Djbk.kemenkeu 2018-2020, diolah

Grafik 5 Rasio Dana Bagi Hasil Menurut Kabupaten /Kota (persen)

Pada grafik Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi penghasil sumber pendapatan yang cukup tinggi potensialnya (rata-rata 8,99) dan Kabupaten Nias paling rendah (rata-rata 1,34).

Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang di analisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya.

Sampel Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu dan di sesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian, sampel didapatkan dari

jumlah populasi adalah 33 sampel sehingga jumlah amatan adalah (33 kabupaten/kota x 5 tahun) = 165 amatan.

Metode Estimasi Data Panel

Dalam metode regresi data panel terdapat tiga buah pilihan model yang dapat digunakan yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Ketiga model ini memiliki kriteria yang berbeda-beda dan peneliti harus dapat memilih model mana yang paling tepat berdasarkan data penelitian yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, dibutuhkan tiga macam pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat yang dapat digunakan peneliti. Ketiga uji tersebut adalah Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier*. Jika dua dari tiga pengujian ini menemukan model yang sama, maka model tersebut yang cocok untuk peneliti.

Pemilihan Model

Pemilihan model melalui beberapa pengujian, pengujian yang dimaksud adalah pertama, uji *Chow* yang digunakan untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih baik digunakan; kedua, uji *Hausman* yang digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan. Berikut hasil pemilihan estimator yang telah dilakukan.

1. Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model yang paling cocok, yaitu Model *Common Effect* atau Model *Fixed Effect*. Jika kesimpulan diterima H_0 maka pilih Model *Common Effect*, jika kesimpulan diterima H_1 maka pilih Model *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* model

H_1 : *Fixed Effect* model

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika:

Nilai Prob. > 0,05 maka estimasi yang digunakan adalah *Common Effect*.

Nilai Prob. < 0,05 maka estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.585420	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	418.665889	32	0.0000

Sumber : Hasil Olahan *views* 10, 2022

Berdasarkan hasil uji *Chow* pada tabel 4.7 diatas, didapatkan hasil nilai *chi-square* sebesar 418.665889 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga berdasarkan hasil uji *Chow*, maka model yang tepat digunakan untuk menganalisa belanja modal yaitu dengan model *Fixed Effect*.

2. Uji hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan apakah model yang paling cocok, yaitu Model *Fixed Effect* atau Model *Random Effect*. Jika kesimpulan diterima H_0 maka pilih *Random Effect*, jika kesimpulan diterima H_1 maka pilih Model *Fixed Effect*. Hipotesis yang

digunakan dalam *hausman test* ini adalah:

H0: *Random Effect* model

H1: *Fixed Effect* model

Dengan kriteria pengambilan keputusan, jika:

Nilai prob. > 0,05 maka estimasi yang digunakan adalah *Random Effect*.

Nilai prob. < 0,05 maka estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	61.578682	4	0.0000

Sumber : Hasil Olahan *eviews* 10, 2022

Berdasarkan hasil uji *Hausman* pada tabel 4.8 diatas, didapatkan nilai *chi-square* sebesar 61.578682 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Sehingga berdasarkan hasil uji *Hausman*, model yang tepat digunakan untuk menganalisis belanja modal adalah dengan model *Fixed Effect*.

3. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Analisis data panel yang digunakan adalah estimasi model *Fixed Effect*. Metode analisis data panel ini telah diuji dengan melakukan uji *Chow* dan uji *Hausman* terlebih dahulu, sehingga akhirnya terpilihlah model *Fixed Effect* sebagai model yang tepat untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini. Jika model *Fixed Effect* telah terpilih sebanyak dua kali dalam uji, maka uji asumsi klasik tidak harus dilakukan dengan asumsi bahwa normalitas dan multikolinearitas telah terpenuhi. Namun tetap perlu dilakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi karena setiap data panel diasumsikan mengalami heteroskedastisitas sebab terdiri dari banyak *Cross Section* dan autokorelasi sebab *error* pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya (Kuncoro, 2011). Implikasi terjadi autokorelasi dan heteroskedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan model *Cross-section SUR*. Apabila model data panel mengalami heteroskedastisitas tanpa autokorelasi dapat diatasi dengan model *Cross-section Weight* (Gujarati, 2012). Dengan menggunakan salah satu metode penyembuhan tersebut pada model *fixed effect* maka otomatis uji asumsi klasik pada data panel dihilangkan. Untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas yang timbul dalam penelitian ini, maka digunakan metode *Cross-section Weight*. Hasil regresi data panel dengan menggunakan model *Fixed Effect* seperti pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 3 Hasil Regresi Model *Fixed Effect* dengan *Cross-section Weight*

Dependent Variable: TKKD
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/09/22 Time: 11:36
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.172439	0.129686	-1.329672	0.1860
PE	-0.142633	0.031472	-4.532048	0.0000
PAD	0.853263	0.014105	60.49583	0.0000
DAU	-0.013024	0.004673	-2.787332	0.0061
DBH	0.017440	0.010674	1.633885	0.1047

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.997288	Mean dependent var	1.379605
Adjusted R-squared	0.996525	S.D. dependent var	0.818112
S.E. of regression	0.025785	Sum squared resid	0.085106
F-statistic	1307.396	Durbin-Watson stat	2.624536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.991675	Mean dependent var	0.907502
Sum squared resid	0.087363	Durbin-Watson stat	2.292671

Sumber : Hasil Olahan *views* 10, 2022

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil persamaan empiris menggunakan *fixed effect* model seperti dibawah ini:

$$TKKD = -0.172439 - 0.142633PE + 0.853263PAD - 0.013024DAU + 0.017440DBH$$

Keterangan:

TKKD = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Alokasi Umum

Pengujian Statistik

Uji t (*t-statistik*)

Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel t statistik pada nilai $df = n - k - 1$ atau $165 - 4 - 1 = 160$ (k adalah jumlah variabel independen), dengan signifikansi 0,05 dan diperoleh hasil t tabel = 1,65.

Tabel 4 Hasil Uji t (*t-statistik*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.172439	0.129686	-1.329672	0.1860
PE	-0.142633	0.031472	-4.532048	0.0000
PAD	0.853263	0.014105	60.49583	0.0000

DAU	-0.013024	0.004673	-2.787332	0.0061
DBH	0.017440	0.010674	1.633885	0.1047

Sumber : Hasil Olahan *evIEWS* 10, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan uji t sebagai berikut:

Nilai t-statistik pada variabel PE (X_1) sebesar $-4,532048 > 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PE secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nilai t-statistik pada variabel PAD (X_2) sebesar $60,49583 > 1,67$ pada t- tabel dan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_2 di terima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nilai t-statistik pada variabel DAU (X_3) sebesar $-2,787332 > 1,67$ pada t- tabel dan nilai probabilitas sebesar $0.0061 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_3 di terima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nilai t-statistik pada variabel DBH (X_4) sebesar $1.633885 < 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,1047 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_4 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Nilai f tabel dapat dilihat pada tabel f-statistik pada $df_1=k-1$ atau $4-1=3$ dan $df_2=n-k-1$ atau $165-4-1=160$. Dengan signifikansi 0,05 diperoleh hasil F tabel = 2,66.

Tabel 5
Hasil Uji F

R-squared	0.997288	Mean dependent var	1.379605
Adjusted R-squared	0.996525	S.D. dependent var	0.818112
S.E. of regression	0.025785	Sum squared resid	0.085106
F-statistic	1307.396	Durbin-Watson stat	2.624536
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.991675	Mean dependent var	0.907502
Sum squared resid	0.087363	Durbin-Watson stat	2.292671

Sumber: Hasil Olahan *EvIEWS* 10, 2022

Dalam tabel 5 nilai f-statistik sebesar $1307,396 > 2,66$ pada F-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$ ini berarti pada level signifikan menyatakan H_0 ditolak dan menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PE, PAD, DAU dan

DBH berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Sumatera utara.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,991675 Nilai ini menunjukkan bahwa 99% Tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Sementara sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil estimasi pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,142633 dengan probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021, sehingga tidak sesuai dengan teori yang diyakini, hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hipotesis di awal, maka disimpulkan apabila variabel pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien sebesar 0.853263 dan probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021, sehingga sesuai dengan teori yang diyakini, sehingga disimpulkan apabila variabel PAD naik maka tingkat kemandirian keuangan daerah naik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Neneng (2018) yang menyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam jurnal penelitian yang berjudul *The Influence of Local Own-Source Revenue to Wards Regional Financial Independence* menyatakan “bahwa keuangan daerah, terdapat pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian dan status pemerintah daerah berpengaruh.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 3 di peroleh hasil dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021. Artinya semakin meningkat DAU maka semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan koefisien sebesar -0,013024 dengan probabilitas sebesar 0,0061 < 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian sebelumnya Kustianingsih & Kahar (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel DBH tidak berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien sebesar 0,017440 dan probabilitas sebesar $0,1047 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki hubungan tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021, sehingga sesuai dengan teori yang diyakini. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyakini bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya Marizka (2013) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, penulis memperoleh kesimpulan dari uji t yang bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent* sebagai berikut:

Nilai t-statistik pada variabel Pertumbuhan ekonomi (X_1) sebesar $-4,532048 > 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PE secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t-statistik pada variabel PAD (X_2) sebesar $60,49583 > 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 di terima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara

Nilai t-statistik pada variabel DAU (X_3) sebesar $-2,787332 > 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,0061 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 di terima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t-statistik pada variabel DBH (X_4) sebesar $1,633885 < 1,67$ pada t-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,1047 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan uji F dengan nilai F-statistik $1307,396 > 2,66$ pada f-tabel dan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$ ini berarti pada level signifikan menyatakan H_0 ditolak dan menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel PE, PAD, DAU dan DBH berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Serta dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,991675 Nilai ini menunjukkan bahwa 99% Tngkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Sementara sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Daftar pustaka

- Gaghana, dkk, 2018. pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*,
- Kołomycew, Anna & Bogusław. 2014. Financial independence of local government units in Poland. *Journal of Universal Excellence*. University of Rzeszów.
- Kustianingsih & Kahar 2018. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah kabupaten kota di provinsi sulawesi tengah
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
2007. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*,
- Marizka, Reza, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. (*Skripsi*) *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang*.
- Neneng, dan Nisa Noor Wahid. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi kasus pada pemerintahan kota Tasikmalaya tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi, Indonesia*.
- Nugraha, Kurnia Fadilah dan Yuli. 2018. The Influence of Local Own-Source Revenue towards Regional Financial Independence. *International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)* Vol 65.
- Suarjana, dkk. 2019. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah atas kemandirian finansial pada daerah- daerah di Provinsi Bali, serta menganalisis kemandirian keuangan masing- masing daerah di Provinsi Bali.
- Widiarsih dan Gayatri, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*